

PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS DI PULAU BURU-MALUKU DAN SURADE-JAWA BARAT)

Marcus J. Pattinama

Program Studi Sosial Ekonomi/Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

E-mail: mjpattinama@gmail.com

Abstrak

Dalam kajian ini dilakukan studi literatur mengenai konsep kemiskinan dan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mendeteksi siapakah penduduk miskin itu? Kemudian mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggulangi kemiskinan, dan akhirnya menggali serta memahami kearifan penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan observasi langsung, *in-depth interview* dan diskusi kelompok fokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak sisi (multifaset). Orang Bupolo dan petani Surade sama-sama mengolah lahan sempit. Petani Surade miskin karena tidak mempunyai lahan atau memiliki lahan tetapi dengan skala usaha yang relatif kecil. Orang Bupolo memiliki tanah yang relatif luas tetapi mempunyai keterbatasan akses pada teknologi, hidup terisolasi karena tidak mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun komunikasi, sehingga mereka hidup miskin dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi definisi kemiskinan perlu diperluas meliputi akses terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Kemiskinan tidak bisa didefinisikan secara tunggal yakni dari kacamata pemenuhan kebutuhan kalori semata sebagaimana yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) selama ini, karena pada hakekatnya definisi kemiskinan tidak hanya bersifat relatif tetapi juga dinamis.

Poverty Reduction through Local Wisdom (A Case Study from Buru Island-Maluku and Surade-West Java)

Abstract

Literature reviews on the concept of poverty and local observation on the field study were employed to investigate who the poor are, in order to seek alternative policies according to specific local conditions to combat poverty, and to see local wisdom in a preventive effort to reduce poverty. Survey methodology, in-depth interviews and focus groups discussions were used in this study. The findings suggest that the concept of poverty is multifacet. Both Bupolo people and Surade farmers cultivate small land. While Surade farmers are poor with no or limited land size and with relatively small scales' business, Bupolo people have relatively larger land size but have limited technology access, and less access to social economic infrastructure, making them poor and only able to survive with food daily. The concept of poverty needs to be extended to include access to social economic infrastructure, remoteness, disempowerment, freedom of speech, and fairness in development. Poverty cannot be defined individually solely from the context of the calorie fulfilment as a standard used by BPS. However, in principle, the concept of poverty cannot only be defined as a relative, but also dynamic concept.

Keywords: poverty, local wisdom, remoteness, small land, multifacet

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai

paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Hakekatnya belum ada keberlanjutan (*sustainability*) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), tahun 2005 ada 35,10 juta penduduk miskin. Kemudian data tahun

2006 menjadi 39,05 juta. Artinya jumlah penduduk miskin bertambah 3,95 juta. Pada tahun 2007 tercatat 37,17 juta orang. Dibandingkan tahun 2006, penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Masalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, khususnya bulan Oktober 2005 yang diikuti oleh inflasi tinggi, diperkirakan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Konflik sosial (Aceh, Maluku, Maluku Utara, Poso, Papua), bencana alam seperti *tsunami* (Aceh, Pulau Buru, Pangandaran), gempa bumi (Timika, Yogyakarta), lumpur panas (Sidoarjo), banjir dan kekeringan diperkirakan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Penanggulangan kemiskinan selama ini telah ditangani melalui kebijakan dan mekanisme, misalnya bantuan langsung tunai (BLT), tetapi kurang efektif karena banyak yang salah sasaran, bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana hingga berakibat konflik sosial. Mengapa? Untuk itu perlu menjawab empat hal: (1) apakah kemiskinan itu dan bagaimana mengukurnya; (2) mengapa mereka miskin?; (3) apakah ada alternatif kebijakan menanggulangi kemiskinan?; dan (4) sejauh mana kearifan lokal memberi kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan?

Saat ini ukuran kuantitatif lebih banyak digunakan oleh pengambil kebijakan, seperti jumlah pemilikan barang, jumlah kalori yang dikonsumsi atau tingkat pendapatan perkapita per bulan. Sayogyo (1978) mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan pendapatan rumah tangga (bukan per kapita) setara beras. Alasannya karena beras merupakan komoditas strategis, makanan pokok dan kemungkinan dijadikan menentukan standar upah (gaji) minimum. Oleh karena itu perubahan harga beras diasumsikan akan diikuti perubahan harga barang kebutuhan pokok lain. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan bahwa mereka yang miskin adalah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan (= beras) dan non pangan.

Ukuran-ukuran kuantitatif ini dalam prakteknya sangatlah kaku ketika diterapkan kepada kelompok masyarakat yang makanan pokoknya non-beras (singkong, ubi-ubian, jagung dan sagu). Kelompok masyarakat yang mengkonsumsi pangan non-beras ini seolah-olah menjadi kelompok inferior, primitif dan miskin hanya karena tidak mengkonsumsi beras. Cara berpikir inilah yang memposisikan komoditi beras sebagai komoditi politik yang penanganannya semakin rumit dan kompleks karena elastisitas permintaannya makin tidak elastis. Masalah kemiskinan seolah-olah hanya dapat diselesaikan dengan distribusi komoditi beras seperti program beras miskin (Raskin).

Kakunya alur berpikir ini mengakibatkan masalah kelaparan yang terjadi di Yahukimo, Provinsi Papua

pada tahun 2005 ditangani dengan mendistribusikan beras karena mengangkut ubi-ubian tidak praktis menggunakan transportasi udara. Ukuran kemiskinan akan barang modal juga bias ketika diterapkan kepada kepemilikan aset modal secara komunal, misalnya lahan usaha pertanian dimiliki oleh kelompok kekerabatan (*clan*) yang tidak mengakui hak pemilikan perorangan. Hal ini banyak dijumpai pada sebagian besar masyarakat di bagian timur Indonesia khususnya di Maluku.

Konsept kuantitatif bisa menimbulkan dua hal, yaitu: Pertama, semakin menambah jumlah angka kemiskinan karena semua orang mau dengan gratis menerima bantuan pemerintah. Kedua, kelompok yang benar-benar miskin tidak tercatat karena tidak dapat dikuantifikasikan. Misalnya, mereka yang hidup di tempat kumuh, pengamen, anak jalanan, di kolong jembatan, pengemis dan pemulung di perkotaan. Ada juga banyak masyarakat terisolir di pedesaan yang tidak terjangkau oleh pencatat data kemiskinan. Konsiderasi ini menghadapkan pemerintah pada masalah sosial yang makin rumit. Pembangunan menjadi terhambat karena penyajian data sosial yang selalu tidak akurat.

Kenyataan yang sekarang terjadi adalah kebijakan negara mengakibatkan adanya kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan (*poverty trap*), deprivasi (*social deprivation*), isolasi, ketidakberdayaan dan ketiadaan akses kepada sumberdaya alam, sarana dan prasarana sosial ekonomi dan kesenjangan (Chambers 1983). Kelompok miskin ini tidak dapat dijangkau melalui pendekatan kuantitatif semata. Oleh sebab itu dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif (deskriptif) dimana tujuannya adalah ingin memecahkan konsep kemiskinan berdasarkan pengetahuan lokal.

Penelitian dilakukan pada kelompok masyarakat asli Pulau Buru, orang Bupolo, di Maluku yang mempraktekkan pola pertanian tidak menetap dan berburu. Orang Bupolo hidup terisolir di pulau yang pernah terkenal karena menawan sekitar 10.000 tahanan politik G30S/PKI, tahun 1969-1979. Mereka hidup di sekitar kekayaan sumberdaya alam yang sementara dieksploitasi hutannya untuk kayu guna kepentingan devisa negara. Penelitian ini juga mengamati kehidupan masyarakat Surade di Jawa Barat yang menganut pola pertanian menetap dan praktek budidaya ternak. Masyarakat di Kecamatan Surade hidup di sekitar keterbatasan sumberdaya alam. Dua sisi kehidupan ini ditampilkan sebagai potret kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di bagian timur dan barat.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini difokuskan pada tiga hal: (1) menggali dan mencari *insight* mengenai definisi dan indikator kemiskinan baik dari tinjauan teoretis yang

ada di literatur maupun yang bersumber dari pemahaman penduduk miskin itu sendiri; (2) mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggulangi kemiskinan; dan (3) menggali dan memahami kearifan penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif menanggulangi kemiskinan.

1.3 Manfaat Penelitian

Dari perspektif ilmu sosial, penelitian ini memberikan kontribusi kepada pengembangan masyarakat dimana masing-masing kelompok masyarakat memiliki ciri khas tersendiri sehingga catatan penting yang bisa diambil adalah satu kelompok masyarakat tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya dan seyogyanya menghindari kesimpulan untuk menggeneralisasikan kelompok masyarakat pada sisi pandang yang sama.

2. Metode Penelitian

2.1 Landasan Teori

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan kompleks, oleh karena itu pengertian/definisi kemiskinan sangat beragam sesuai evolusi ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu sosial. Tanpa mengurangi makna konsep kemiskinan yang sudah dipakai selama ini, maka definisi kemiskinan lebih mengikuti pemikiran konvensional yakni mereduksi masalah kemiskinan kepada terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). Definisi ini diperluas ke dalam ukuran pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier yang terus meningkat, tersedianya fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan dan pasar (Suhardianto, 1999). Secara spesifik kesejahteraan dinilai dari kekurangan pendapatan, konsumsi, pemilikan harta benda baik diam maupun bergerak, aset modal dan stok. Nilai minimum penghasilan rumah tangga miskin adalah kurang dari 1920 kg setara beras per rumah tangga per tahun (Sayogyo, 1978; Tjondronegoro, Soejono & Hardjono, 1996; van Oostenbrugge, van Densen & Machiels, 2004). Makin tinggi pendapatan diasumsikan makin baik konsumsi kalori dan gizi.

Menurut Chambers (1983), kemiskinan berkaitan dengan masalah privasi sosial, akses ke sumberdaya seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan serta transportasi. Akar masalah kemiskinan adalah ketergantungan, isolasi, ketidakberdayaan (*vulnerability*) dan rendahnya harapan hidup. Oleh karena itu kemiskinan mempunyai banyak sisi: ekonomi, sosial dan politik (Harris-White, 2005). Secara ekonomi penduduk miskin tidak memiliki apa-apa (*having nothing*), secara sosial mereka tidak menjadi siapa-siapa (*being nothing*), dan secara politik mereka tidak memperoleh hak kecuali korban pembangunan (*having no rights and being wrong*). Karena multidimensi,

kemiskinan itu ibarat istilah kecantikan yang didefinisikan berbeda oleh orang yang melihatnya. Jadi kemiskinan itu tidak bisa terlepas dari aspek politik, sehingga tidak ada definisi kemiskinan yang paling benar: *There is no one correct, scientific, agreed definition because poverty is inevitably a political concept and thus inherently a contested one* (Alcock, 1997). Strategi nafkah rumah tangga berkelanjutan (*sustainable household livelihood strategies*) merupakan salah satu upaya alternatif mengatasi kemiskinan. Definisi nafkah berkelanjutan adalah sebagai berikut: *"A livelihood comprises the capabilities, assets (including both material and social resources) and activities required for a means of living. A livelihood is sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks and maintain or enhance its capabilities and assets both now and in the future, while not undermining the natural resource base"* (Carney 1998; Clayton, David & Olivier 2000).

Kemiskinan seyogyanya bersimpul pada empat konsep yang sudah dikenal selama ini: baik kemiskinan absolut dan relatif maupun kemiskinan objektif dan subjektif. Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup. Artinya merujuk pada perbedaan sosial yang diperoleh dari distribusi pendapatan. Intinya pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata, sementara kemiskinan relatif, ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat kesejahteraan antar penduduk. Pendekatan objektif dan subjektif terhadap kemiskinan berkaitan erat dengan perkembangan pendekatan kualitatif-partisipatoris. Kebutuhan kalori adalah pendekatan objektif, sedangkan kemiskinan subjektif lebih menekankan pemahaman pada konsep kemiskinan dari sudut pandang masyarakat miskin.

Dengan menggali dan mengembangkan kearifan lokal, kemiskinan tidak hanya dapat dikurangi (*relieving*) tetapi juga dapat dihindari (*preventing*) karena lestariannya sumberdaya bagi generasi berikutnya (Soerjani, 2005). Kearifan lokal mengandung norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kearifan lokal seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan anti kemiskinan. Bahwa di luar pendekatan yang bercorak strukturalis, sesungguhnya kita dapat menggali mozaik kehidupan masyarakat setempat yang bernama kearifan kolektif atau kearifan budaya. Di setiap masyarakat mana pun kearifan semacam itu tertanam dalam di relung sistem pengetahuan kolektif mereka yang dialami bersama. Itulah yang sering disebut sebagai *local-wisdom*. Para ahli juga sering menamakan *local-knowledge*, pengetahuan setempat yang

berkearifan. *Pela-gandong* di Maluku misalnya, merupakan contoh dari kearifan budaya lokal.

Kearifan lokal lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Kelihatannya tidak ada ilmu atau teknologi yang mendasarinya. Kearifan lokal meniscayakan adanya muatan budaya masa lalu dan berfungsi untuk membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang, yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang. Kearifan lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang. Jadi kearifan lokal dapat dijadikan simpai perekat dan pemersatu antar generasi. Hal yang sering menjadi pertanyaan apakah kearifan lokal ini bisa dijadikan kekuatan dalam zaman modern dan era globalisasi? Kehidupan masa kini di Indonesia tidak semuanya modern. Komponen lain yang menunjang modal masyarakat adalah saling percaya (*trust*) di mana nilai ini akan mampu menjadi modal masyarakat yang tangguh. Pertanyaannya: apakah kita memiliki *trust* tersebut dalam masyarakat yang sedang dalam proses reformasi kini? Apakah kita bisa saling mempercayai?

2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam kajian ini dilakukan tiga hal. Pertama, melakukan studi literatur mengenai konsep kemiskinan. Kedua, melakukan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mendeteksi: siapakah penduduk miskin itu baik menurut masyarakat di desa maupun informan kunci? Pengamatan dilakukan untuk mengetahui persepsi dan konsepsi kemiskinan. Selanjutnya didiskusikan pola konsumsi rumah tangga miskin. Ketiga, menginterpretasi makna kemiskinan menurut perspektif penduduk lokal. Di sini ada pertemuan konsep kemiskinan antara yang disebut dalam literatur dengan konsep masyarakat lokal. Indikator penduduk miskin menurut konsepsi orang luar ada yang sama dengan indikator yang digunakan berdasarkan pengakuan mereka sendiri. Namun ada pula perbedaan konsep kemiskinan antara perspektif orang luar dan penduduk lokal. Perbedaan ini bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan tetapi dipandang sebagai perbedaan untuk melengkapi definisi yang sudah ada.

2.3 Metode dan Teknik

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pendekatan ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan bertanggungjawab. Pada prinsipnya penelitian ini lebih berpijak pada penelitian kualitatif. Untuk mencapai tiga tujuan seperti yang disebut di atas, maka data yang dikumpulkan dengan prinsip triangulasi: dianalisis secara kualitatif, tabulasi silang, dan analisis isi. Dalam hal ini yang dipentingkan bukan banyaknya contoh (*sample*) atau bertujuan untuk melakukan generalisasi, tetapi mengangkat kasus yang spesifik dan mendalam. Untuk mengungkapkan

keterkaitan antara masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam lokal serta masalah kemiskinan, maka analisis yang dikembangkan adalah analisis dalam dan analisis luar. Analisis dalam lebih difokuskan untuk menjelaskan karakteristik dengan mengembangkan konsep yang sudah ada dalam suatu masyarakat (kearifan lokal), sedangkan analisis luar menganalisis hubungan antara aspek sosial dan aspek teknik secara interdisipliner (Pattinama, 2005). Baik analisis dalam maupun analisis luar dilakukan dengan observasi langsung pada aktivitas manusia dengan lingkungannya.

2.4 Proses Pengumpulan Data

Pengambilan data lapangan dilakukan secara sistemik melalui kuesioner (kuantitatif) dan wawancara mendalam/*in-depth interview* (kualitatif). Selain itu riset ini disertai dengan diskusi kelompok fokus (*Focus Group Discussion*) dan pengamatan lapang untuk lebih memahami kondisi nyata yang terjadi. Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat dan pemerintah pada level kampung/desa hingga kabupaten. Data primer yang dikumpulkan meliputi indikator-indikator kemiskinan, penyebab kemiskinan, lingkaran kemiskinan dan pola konsumsi (makanan dan non-makanan) penduduk miskin. Indikator-indikator kemiskinan penting diketahui untuk memahami kemiskinan dari perspektif orang miskin itu sendiri. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur yang saling terkait dengan wilayah riset. Fokus penelitian adalah kelompok penduduk miskin. Kelompok sasaran ditentukan berdasarkan pengenalan akan kondisi lapang dan informasi awal yang telah diperoleh dari informan kunci (*key informan*). Mengingat keterbatasan dana, rentang kendali wilayah riset dan waktu serta tenaga, maka kelompok sasaran di Pulau Buru adalah masyarakat Kampung Waereman yang hidup terisolir di daerah pedalaman, sedangkan di Jawa Barat dibatasi di Desa Wanasari, Kecamatan Surade, Sukabumi.

3. Analisis dan Interpretasi Data

3.1 Diskripsi Pulau Buru dan Surade

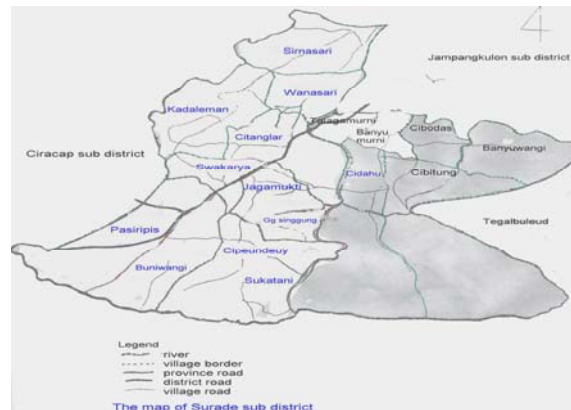
Luas Pulau Buru adalah 10.000 km² (Gambar 1) dengan jumlah penduduk terdaftar tahun 2007 sekitar 122.527 jiwa. Bupolo adalah nama pulau Buru menurut bahasa Buru. Penduduk asli disebut orang Bupolo. Ada dua kabupaten dan masing-masing memiliki 5 kecamatan. Ibukota Kabupaten Buru Utara, Namea, sedangkan Kabupaten Buru Selatan ibukotanya Namrole. Pulau Buru memiliki garis pantai yang panjang dan topografi wilayah bergunung, akibatnya wilayah dataran hanya dijumpai di pesisir pantai. Transportasi darat belum memadai. Sebagian besar desa ditempuh dengan transportasi laut, sedangkan desa/kampung di pegunungan dijangkau melalui jalan kaki. Di tengah Pulau Buru terdapat Danau Rana seluas 75 km² dan Gunung Date. Air dalam danau berasal dari Gunung Date. Dua objek ini dinyatakan sakral (keramat) oleh



Gambar 1. Pulau Buru, Provinsi Maluku

orang Bupolo. Di antara penduduk, dibedakan antara penduduk asli (*autokton*) yang mendiami wilayah pegunungan dan terisolir dengan jumlah 9,8% (12.008), dan penduduk pendatang (*alokton*) mendiami daerah pesisir pantai. Pendatang adalah warga keturunan Cina dan Arab, ditambah dengan suku lainnya dari Nusantara. Sejarah perdagangan rempah dan kayu putih yang menghantar mereka ke pulau ini ratusan tahun yang lampau. Penduduk makin plural dengan hadirnya sekitar 10.000 tahanan politik G30S/PKI (1969-1979), dan setelah itu masuknya program transmigrasi. Mayoritas penduduk adalah petani-nelayan (pesisir pantai), sedangkan *autokton* di pegunungan berprofesi sebagai petani-berburu.

Berbeda dengan Pulau Buru, Kecamatan Surade terletak di sebelah selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi 4.128 km², dengan jumlah penduduk 2.059.920 jiwa. Ada terdapat 47 kecamatan. Lokasi kajian di Kecamatan Surade menunjukkan bahwa 11 desa dalam kecamatan tersebut mempunyai karakteristik berbeda satu dengan yang lain, khususnya akses ke lokasi pasar dan ibukota kecamatan (Gambar 2). Jarak dari desa ke ibukota kecamatan bervariasi dari dua sampai dengan 30 kilometer. Alat angkutan ke desa pada umumnya menggunakan angkutan roda dua/sepeda motor (disebut ojek) atau jalan kaki. Jumlah penduduk berkisar antara 3800 hingga 5000 jiwa per desa. Daerah ini memiliki sarana dan prasarana irigasi walaupun sebagian besar lahannya tadah hujan. Penduduk desa di Surade umumnya bertani dengan mengusahakan tanaman padi dan palawija serta beternak. Sapi dan kerbau masih diperlukan sebagai sumber tenaga pengolahan sawah. Selain itu, ayam kampung dan kambing merupakan sumber gizi dan pendapatan rumah tangga. Petani Surade menghadapi dua kendala besar untuk ternak sapi dan kerbau, yakni kekurangan pakan ternak pada musim kering dan penularan penyakit cacing hati pada ternak sapi dan kerbau di musim hujan. Kedua hal ini berakibat pada penurunan berat, tenaga membajak, kemampuan menyerap gizi makanan serta kemampuan sapi untuk melahirkan. Secara ekonomi, kerugian petani akibat



Gambar 2. Peta Kecamatan Surade, Sukabumi, Jawa Barat

penyakit cacing hati semakin besar dan bisa berdampak pada produktivitas usaha tani yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan petani.

3.2 Kemiskinan dan Kearifan Lokal di Pulau Buru

Perjalanan ke lokasi riset di Kampung Waereman hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki selama empat hari, tidak ada pilihan lain. Perjalanan melintasi gunung, sungai dan kampung. Oleh sebab itu, diduga peneliti atau petugas statistik bisa menyimpulkan secara sepihak bahwa penduduk di wilayah ini dikategorikan miskin.

Guna menghindari penafsiran tunggal akan realitas sekaligus menekankan bahwa realitas itu adalah jamak, maka setiap individu penduduk miskin difasilitasi untuk membuat definisi miskin. Mengingat sebagian besar responden adalah buta aksara, maka peneliti lebih mengandalkan komunikasi lisan dan diskusi terbuka. Idealnya definisi miskin setiap responden ditulis pada sehelai kertas kemudian dibagikan kepada yang lain untuk didiskusikan bersama. Dari hasil diskusi maka definisi kemiskinan menurut penduduk miskin ternyata memiliki banyak sisi. Setiap orang membuat definisi khusus mengenai kemiskinan.

Pada akhir diskusi, ternyata ada banyak persamaan dan perbedaan persepsi mengenai apa yang disebut miskin oleh penduduk miskin di Pulau Buru. Dari sejumlah indikator yang diungkapkan, ada 98% menyatakan bahwa keterisolasian wilayah yang menjebak mereka sebagai orang miskin, karena produksi pertanian, hasil meramu hutan dan berburu sangat sulit dipasarkan. Akibatnya ciri pertanian yang dipraktekan adalah subsisten. Jadi jalur transportasi darat menjadi tema utama diskusi. Pada tahun 1980-an pemerintah melancarkan program *resettlement* masyarakat terasing. Orang Bupolo dari pegunungan dimukimkan kembali di daerah pesisir pantai. Mereka diberi rumah dan jaminan hidup selama setahun. Setelah program selesai, orang Bupolo kembali lagi ke habitat awal. Dengan demikian

indikator kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan perumahan tidak direspons secara serius. Kemudian indikator yang sebagian besar diungkapkan oleh responden adalah sulitnya akses ke pasar. Juga indikator buta aksara (pendidikan) yang benar-benar mencirikan mereka sebagai orang miskin. Orang Bupolo walaupun disebut orang miskin menurut cara pandang eksterior dan kriteria umum yang berlaku, namun di sisi lain mereka memiliki nilai dan norma untuk melindungi hutan, sumber air, danau, gunung, tanaman tahunan (sagu, minyak kayu putih dan pohon lainnya) serta tanaman pangan. Hutan primer merupakan tempat tinggal roh nenek moyang yang memelihara kelangsungan manusia dan alam. Oleh karena itu, orang Bupolo melarang pengusaha eksploitasi hutan untuk beroperasi di hutan primer yang dinyatakan sakral, sedangkan hutan sekunder adalah tempat aktivitas pertanian.

Dapat dipahami bahwa keputusan orang Bupolo yang hidup terisolir untuk menolak secara halus program *resettlement* adalah keputusan yang rasional untuk menjaga teritorial adat milik mereka. Untuk itu mereka membagi ruang pulau Buru atas tiga bagian. Pertama, kawasan yang dilindungi karena nilai kekeramatannya. Wilayah ini termasuk Gunung Date (*kaku Date*), Danau Rana (*Rana Waekolo*), dan tempat keramat di hutan primer (*koin lalen*). Kedua, kawasan yang diusahakan, meliputi pemukiman (*humalolin dan fenalalen*), kebun (*hawa*), hutan berburu atau meramu (*neten emhalit dan mua lalen*), hutan kayu putih (*gelan lalen*) dan tempat memancing (*wae lalen*). Ketiga, kawasan yang tidak diusahakan, meliputi bekas kebun (*wasi lalen*) dan padang alang-alang (*mehet lalen*). Inti dari konsep dan pemahaman terhadap lingkungan dengan berbagai aturan adat dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dan sekaligus mempertahankan nilai keberadaan dari satuan kawasan yang sudah merupakan suatu identitas yang harus dipertahankan. Namun, dalam perkembangan saat ini dengan hadirnya para penebang pohon yang memperoleh hak menebang atas izin negara (HPH), telah terjadi kemunduran kualitas lingkungan yang memberi dampak pada perubahan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kuatnya ikatan orang Bupolo dengan suatu ruang adalah adanya cerita mitos yang sekaligus pula menjadi perekat diantara mereka, misalnya gunung dan air adalah dua kekuatan yang memberikan banyak inspirasi hidup bagi orang Bupolo untuk tetap bertahan pada wilayah pegunungan yang terisolir. Oleh sebab itu dalam keseharian, Gunung Date adalah tempat berdiam para leluhur. Jadi Gunung Date harus dijaga dengan tatanan adat yang kuat dari pengaruh orang luar, dengan memberlakukan larangan membawa orang luar mengunjungi dan melintasi Gunung Date.

Organisasi waktu menurut pemahaman orang Bupolo disesuaikan menurut fenomena alam dari dua jenis pohon: *Kautefu* (*Pisonia umbellifera* Fors & Soom) dan

Emteda (*Terminalia* sp.). Untuk pohon yang pertama (*kautefu*), jika buahnya telah mengeluarkan cairan seperti lem, maka musim panas akan tiba atau sering disebut *mena kautefupolo*. Itu berarti kegiatan menebang pohon, membersihkan lahan dan membakar akan segera dilaksanakan. Pohon yang kedua (*emteda*) lebih banyak dipakai untuk menandai kegiatan mereka sepanjang tahun. Urutan pengamatan terhadap perubahan fisiologi tanaman *Terminalia* sp. dapat diikuti sebagai berikut: *Emteda omon bato* (daun berlobang, warna kuning) artinya musim panas terik: mulai menebang dan membersihkan lahan. *Egroho* (daun gugur) artinya musim panas: kegiatan membakar. *Efut* (tunas daun mulai muncul) artinya panas diselingi dengan gerimis: musim tanam diawali dengan upacara adat dan pada saat yang sama dilaksanakan perayaan perkawinan. Orang Bupolo selalu menanam kacang tanah (*Arachis hypogaea*) sebagai tanaman pertama, di sekeliling kebun ditebar tanaman *feten* (*Setaria itallica*), padi ladang (*Oryza sativa*) dan jagung (*Zea mays*). *Efut ale* adalah masa ketika daun mulai membesar dan bakal buah mulai keluar. Artinya musim panas dan gerimis pada sore hari. Pada musim ini kegiatan menyiang hanya dilakukan oleh kaum perempuan, sedangkan kaum lelaki mulai kegiatan penyulingan minyak kayu putih dan berburu rusa. *Selwala hat* (buah besar) artinya akhir dari musim hujan. Pada masa ini kegiatan orang Bupolo adalah mengumpulkan damar dan rotan sekaligus melakukan kegiatan berburu.

Kearifan lokal berikutnya adalah pengetahuan orang Bupolo mengorganisasikan makanan sesuai dengan aktivitas mereka yang berbeda yakni pada saat di dalam rumah dan di luar rumah. Mereka mengusahakan tanaman sagu (*Metroxylon sagu*) sebagai makanan pokok dan mengkonsumsinya dalam bentuk *papeda*. Makin berkurang populasi rumpun sagu, karena hutan sagu sudah berubah fungsi menjadi tempat tawanan G30S/PKI masa itu dan lokasi transmigrasi. Populasi tanaman sagu jelas menjadi berkurang, akhirnya orang Bupolo memilih singkong (*Manihot esculenta*) yang kemudian diolah untuk menghasilkan tepung. Mereka juga mengonsumsi protein hewani seperti daging babi, rusa dan *kusu* (*Phalanger dendrolagus*), selain itu ikan air tawar (mujair) dan *morea* (*Anguilla marmorata*). Orang Bupolo juga menanam padi ladang dan tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa dan coklat.

Pada umumnya orang Bupolo makan tiga kali sehari: pagi jam 08.00–09.00, siang jam 13.00, dan malam jam 19.00. Menu sarapan pagi adalah minum kopi yang dicampur dengan *siwi* (*Curcuma xanthorrhiza*) disebut kopi *siwi*, dengan makanan yang direbus dari singkong, ubi dan petatas, dilengkapi kacang rebus. Orang Bupolo ke kebun tanpa membawa bekal untuk makan siang, di sana mereka hanya makan singkong dan ubi bakar. Jika aktivitas hanya di rumah, menu makan siang adalah sagu, singkong, umbian atau pisang rebus. Protein

bersumber dari ikan mujair, daging hewan berburu dan *morea* (*Anguilla marmorata*). Ikan dan *morea* diperoleh di Danau Rana. Menu makan malam selalu sama dengan makan siang. Pada saat tertentu menu makan malam dilengkapi dengan daging babi hutan, *kusu* (*Phalanger dendrolagus*), rusa dan udang air tawar. Untuk mendapatkan tepung sagu dari pohon sagu maka perlu dilakukan beberapa langkah yaitu sagu ditokok dengan menggunakan alat tradisional, setelah itu empulurnya dimasukkan dalam bak saringan yang ditapis dengan air. Kemudian air yang keluar dari bak penapisan akan masuk dalam bak penampungan tepung sagu. Setelah itu tepung basah bisa dikonsumsi menjadi *papeda* atau tepungnya dikeringkan untuk dibuat menjadi sagu kering dengan cara membakar. Hal yang sama dilakukan untuk singkong. Selain konsumsi tanaman padi ladang, orang Bupolo juga mengkonsumsi tanaman sereal lain yang disebut *feten* (*Setaria italica*). *Feten* dan beras dikonsumsi hanya pada saat acara ritual adat.

Khusus di Maluku, kebijakan kemiskinan perlu memperhatikan kearifan lokal yakni budaya *sasi*. *Sasi* adalah seperangkat norma, adat dan aturan dan sanksi mengenai larangan pengambilan hasil tanaman/tumbuh-tumbuhan, ikan dan hewan buruan sebelum waktu yang telah disepakati/ditetapkan oleh pimpinan dan tokoh masyarakat bersama warga masyarakat (*kewang* dan gereja/mesjid). Tujuannya adalah konsevasi. Di Pulau Saparua misalnya, masih ditemukan 30 aturan *sasi* dan 17 jenis sanksi/denda (Pattiselano, 2000). Secara umum dikenal dua jenis *sasi*. Pertama, *sasi* pemerintahan desa (negeri). *Sasi* ini dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah desa, sehingga barang siapa yang melanggar *sasi* akan dikenakan sanksi oleh pemerintah desa. Sanksi yang dikenakan adalah denda dalam bentuk uang atau materi. *Sasi* jenis kedua disebut *sasi* gereja/mesjid. *Sasi* ini dikeluarkan dan diumumkan oleh pimpinan keagamaan. Berdasarkan pengakuan masyarakat desa, *sasi* gereja/mesjid lebih dipatuhi warga karena takut mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hukuman itu dapat berupa sakit penyakit, mara bahaya atau kegagalan panen. Terminologi *sasi* dikenal oleh masyarakat Maluku yang berasal dari Pulau Ambon-Lease dan Seram. Masyarakat di Pulau Buru menyebutnya dengan istilah *sihit* (larangan) dan hanya dilakukan oleh pemangku adat dan tidak melibatkan institusi agama (khusus bagi orang Bupolo yang masih taat mempraktekan ritual adat). Yang menarik dapat disebutkan bahwa bagi orang Bupolo yang tinggal di pesisir pantai (*Geba Masin*) dan sudah memeluk agama, maka aturan *sihit* sudah dipraktekan seperti yang berlaku dalam aturan *sasi* gereja/mesjid. Pada saat acara buka *sasi*, setiap warga desa bebas untuk memanen hasil tanaman, ikan, dan binatang buruan. Sebaliknya, pada waktu *sasi* dinyatakan ditutup, maka setiap warga desa tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil tanaman, ikan, dan hewan buruan.

Jenis tanaman yang umumnya di-*sasi* adalah tanaman perkebunan, sedangkan hasil laut yang biasa di-*sasi* adalah ikan *lompa* dan teripang (khusus masyarakat Maluku di Pulau Haruku). Hewan buruan yang di-*sasi* antara lain babi, rusa dan *kusu*. Mengapa harus ada *sasi* dan *sihit*? Tujuan utama *sasi* dan *sihit* adalah melestarikan sumberdaya alam seperti tanaman, hasil laut dan binatang buruan dimana komoditas tersebut tergolong langka dan berharga. Selain itu, *sasi* atau *sihit* dipraktekan untuk mengontrol dan membatasi keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Akhir-akhir ini ada gejala penurunan praktek *sasi* hingga 25% (Pattiselano, 2000), karena berhadapan dengan nilai kapitalisme yakni desakan kebutuhan ekonomi yang makin cepat terutama pasca kerusuhan sosial di Maluku (1999-2003). Di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa *sasi* masih penting guna menghindari penduduk dari kemiskinan (*preventing poverty*) sumberdaya alam.

3.3. Kemiskinan dan Kearifan Lokal di Surade

Berbeda dengan di Pulau Buru, responden di Surade, Jawa Barat ini bisa baca dan tulis, sehingga definisi kemiskinan menurut mereka ditulis pada sehelai kertas kemudian dibagikan kepada yang lain untuk didiskusikan bersama. Dari sejumlah indikator yang diungkapkan, sebagian besar menyatakan indikator kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian dan perumahan. Disamping itu juga ditekankan pada jenis pekerjaan utama dan pendapatan rumah tangga. Akses terhadap modal khususnya pendidikan, kesehatan serta produktifitas kerja juga ditemukan sebagai indikator yang saling berhubungan satu sama lain.

Berbeda dari kriteria umum, ada 17% yang menerjemahkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan fisik sekaligus biologis dan batin. Definisi ini datang dari penduduk miskin yang statusnya wanita sekaligus sebagai kepala rumah tangga (janda). Seorang janda menurut mereka, tidak hanya kesulitan dalam mencari nafkah karena pendidikan dan ketrampilan rendah tetapi juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biologis serta kebutuhan batin untuk berdiskusi dengan suami di dalam rumah tangga. Kondisi ini banyak terjadi di kalangan wanita kepala rumah tangga sekaligus pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anak (Girsang, 2005).

Kategori miskin yang banyak dikemukakan responden adalah tanah untuk rumah, pekarangan dan usaha pertanian. Dengan kata lain, penduduk yang memiliki lahan sempit atau *gurem* (<0.5 ha) sama sekali tidak memiliki tanah. Mereka adalah penduduk miskin karena tidak mampu memenuhi kesejahteraan keluarga (Sayogyo, 1978). Ada 92% penduduk miskin menyatakan bahwa tanah sawah dan ladang merupakan kriteria utama. Tanah atau ladang masih dianggap harta terpenting karena menjadi jaminan sumber nafkah dan warisan

bagi generasi berikutnya. Tanpa memiliki tanah maka tidak ada kepastian bagi seorang penduduk desa (petani) untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya.

Kategori kemiskinan berikutnya adalah tidak mempunyai pekerjaan tetap (*uncertainty*). Pekerjaan utama seorang penduduk miskin dapat ditemukan pada kegiatan usaha pertanian dan non pertanian. Pekerjaan yang tidak menentu berakibat pada lima indikator kemiskinan sumberdaya manusia (*human capital*) yang saling berkaitan satu dengan lainnya yakni ekonomi, sosial, pangan, kesehatan dan politik (Harris-White, 2005). Keterkaitan kelima aspek tersebut yakni: secara ekonomi mereka merasa tidak memiliki apa-apa (*having nothing*). Secara sosial (termasuk pangan dan kesehatan) mereka tidak dianggap siapa-siapa yang tampak dari kondisi rumah panggung yang terbuat dari bambu, makanan tidak bergizi, dan tidak mempunyai biaya berobat jika sakit. Secara politik hak-haknya sebagai warga negara diabaikan dan cenderung disalahkan sebagai penyebab kegagalan pembangunan.

Data kuantitatif di lapangan mencatat pendapat responden yang beragam mengenai kategori kemiskinan yaitu: 58% mengemukakan penduduk miskin adalah memiliki tingkat pendidikan rendah, 26% menyatakan tidak mempunyai ternak peliharaan, dan 25% mengatakan sulitnya akses ke pasar.

Indikator kemiskinan dapat pula dilihat dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan anggota keluarga. Secara umum diperoleh gambaran bahwa penduduk miskin hanya makan dua kali dalam sehari. Makan pertama adalah makan pagi antara jam 7 dan 8. Makan kedua adalah makan sore (malam) pada jam 17.30. Siang hari mereka hanya minum air (masak atau mentah) dan singkong rebus atau pisang goreng. Saat makan malam, mereka mengonsumsi nasi, ikan dan sayuran/lalapan kembali. Jumlahnya hampir sama dengan kebutuhan makan di pagi hari. Setelah makan sore (malam) mereka biasanya duduk-duduk di depan rumah berdiskusi dengan tetangga sambil merokok. Pukul 20.00 adalah waktu beristirahat (tidur). Konsumsi makan sore untuk anak-anak hanya berupa singkong rebus yang diberi bumbu gula merah. Kondisi kekurangan makanan pada musim paceklik tidak hanya dialami orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak-anak. Beras adalah makanan pokok. Pada musim panen penduduk miskin memperoleh beras dengan cara membagi hasil panen dengan pemilik lahan.

Pada musim panen, petani di desa-desa kecamatan Surade, Jawa Barat, memiliki pengetahuan lokal mengenai jerami padi sebagai pakan ternak sapi atau kerbau. Sebelum diberikan kepada sapi, jerami dipotong terlebih dahulu sekitar 20 cm atau lebih dari atas permukaan tanah, kemudian disisir, dibersihkan dan diangkut dengan alat pikul (*sundung*). Menurut petani,

tujuan perlakuan terhadap jerami adalah membebaskan ternak dari penyakit yang mungkin ada di bagian batang bawah hingga akar tanaman. Berdasarkan hasil penelitian Balai Penelitian Veteriner (Balitvet) Bogor, ternyata bagian batang bawah jerami (setinggi air atau pematang sawah, <20 cm dari permukaan tanah) ternyata mengandung penyakit cacing hati (*Fasciola gigantica*) yang berbahaya dan menular bagi ternak sapi (Suhardono, Copeman & Roberts, 1996). Sapi akan terhindar dari penyakit tersebut ketika petani memotong batang bawah jerami yang mengandung penyakit cacing hati sesuai prosedur yang tepat.

Pengetahuan lokal lain adalah memperlakukan kotoran sapi. Petani sengaja membangun kandang sapi di dekat atau di samping sawah dan rumah. Tujuan utama adalah menghemat waktu dan tenaga saat mengontrol dan merawat sapi. Di samping itu, kotoran sapi dapat dengan mudah dialirkan ke sawah sebagai pupuk organik. Berdasarkan hasil penelitian tim dari Balitvet Bogor, kotoran ternak yang terinfeksi penyakit cacing hati ternyata menjadi sumber penyebaran penyakit cacing hati ke semua wilayah sawah melalui siput (*Lymnaea rubiginosa*). Cara lain penanganan kotoran sapi adalah menghentikan mengalirkan kotoran sapi langsung ke sawah, dengan cara menggali lubang untuk menampungnya dan pada saatnya akan dibuat kompos. Jadi kotoran ternak dikomposkan terlebih dahulu sebelum dijadikan pupuk alamiah ke dalam sawah. Ternyata dalam proses pengomposan dengan suhu antara 40-50°C sudah cukup membunuh bibit penyakit yang ada di dalam kotoran sapi. Petani memiliki kebiasaan memelihara ayam kampung di samping rumah sekaligus membiarkan ayam kampung mencari makan di kandang sapi (Girsang, 2005).

Keeratan sosial merupakan bentuk kerjasama sosial untuk melakukan tindakan bersama guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama ini dalam berbagai bentuk di pedesaan. Beberapa diantaranya dapat diidentifikasi: kerjasama membangun kantor desa, kerjasama merenovasi atau membangun rumah (*rereongan*), kerjasama mengolah tanah, menanam dan memanen hasil usahatani, kerjasama memperbaiki sarana jalan dan *reciprocity* dalam bentuk acara perayaan pesta.

Di Surade juga terdapat kebijakan keamanan pangan dengan mendirikan lumbung desa. Lembaga ini dibentuk oleh warga desa sendiri karena petani menyadari bahwa ada musim paceklik dimana persediaan beras sangat terbatas. Jika tidak ada persediaan beras maka banyak penduduk desa yang mengalami kelaparan. Untuk mengantisipasi kekurangan pangan maka setiap petani diwajibkan menyisihkan sekitar 5-10 kilogram hasil panen di lumbung desa. Setiap petani diberi kesempatan meminjam dari lumbung desa dengan tingkat bunga tertentu. Hal ini

diperlukan agar ada dana pengelolaan lumbung. Dengan demikian, lumbung desa merupakan jaminan sosial (*social insurance*) bagi petani dari ancaman kelaparan.

3.4 Diskusi

Studi literatur dan observasi lapangan menunjukkan bahwa konsep kemiskinan memiliki banyak sisi, misalnya sisi ekonomi, sosial (kesehatan, pendidikan), kultural, kelembagaan dan politik. Sisi-sisi kemiskinan itu lahir dari penggalian mendalam faktor-faktor penyebab kemiskinan. Misalnya, aspek ekonomi dari sisi kemiskinan adalah kekurangan pangan yang berakibat kelaparan. Kekurangan pangan dapat terjadi karena produksi rendah, teknologi yang tidak berkembang dan pendapatan rumah tangga yang pas-pasan dan tidak menentu. Oleh karena itu tidak ada satu definisi kemiskinan yang tunggal dan berlaku mutlak untuk semua orang di semua tempat. Konsekuensinya, memahami kemiskinan memerlukan berbagai perspektif sudut pandang (*multilenses*). Kebijakan kemiskinan bersifat spesifik tanpa melepas keterkaitannya dengan berbagai faktor kemiskinan lain. Prioritas menanggulangi kemiskinan di Surade misalnya, adalah menyediakan beras murah karena daya beli yang lemah, menciptakan ketrampilan dan lapangan kerja, sedangkan prioritas penanggulangan penduduk miskin di Pulau Buru bukan mensuplai beras murah karena mereka tidak kekurangan makanan (walau program *raskin* juga diberlakukan di Maluku), tetapi memberdayakan sistem kelembagaan mereka dalam berhubungan dengan pihak luar (khususnya pedagang), menurunkan biaya hidup (waktu, tenaga dan uang) dengan membuka keterisolasian melalui perbaikan infrastruktur fisik, pendidikan dan kesehatan. Semua aspek yang diprioritaskan tidak bisa lepas dari motivasi penduduk miskin untuk berubah (kultural) sekaligus aspek politik pemerintah dan komitmen pelaku pembangunan lain untuk memberdayakan penduduk miskin.

Kearifan lokal sama sekali tidak bisa diperoleh melalui suatu pendidikan formal dan informal tetapi hanya bisa dipahami dari suatu pengalaman yang panjang melalui suatu pengamatan langsung. Kearifan lokal lahir dari *learning by experience* yang tetap dipertahankan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kegunaan utama kearifan lokal adalah menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya dan kelestarian sumberdaya alam.

Pada prinsipnya sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain (karena secara biologi memiliki akal dan fungsi otak untuk bisa berpikir), penduduk miskin masih diberi suatu *insting* yang diperoleh dari fungsi otak tersebut untuk dapat mengorganisasikan hidupnya. Walaupun mereka sendiri mengkategorikan diri mereka sebagai orang miskin, namun mereka memiliki kemampuan untuk bertahan dan melanjutkan hidup dan keturunannya.

Mereka memiliki kemampuan memanfaatkan segala energi dari dalam diri (internal) maupun energi dari sumberdaya disekitarnya (eksternal). Penduduk miskin telah menunjukkan keuletan dan kemampuan sendiri untuk menciptakan nafkah, memelihara sumberdaya alam dan tradisi lokal. Hal inilah yang melahirkan konsep kearifan lokal secara alami.

Dari sudut pandang kriteria kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah, penduduk miskin adalah orang pasrah dengan hidup apa adanya (*nrimo*), walaupun pemerintah sendiri sangat sulit mendapatkan senjata pamungkas untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Ironisnya, apakah mereka mendapat bantuan atau tidak dari pemerintah, tampaknya mereka tetap hidup dan terus berkarya untuk memberikan kontribusi dalam program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Untuk dapat memahami kemiskinan secara utuh diperlukan pemahaman mengenai seluruh dimensi kehidupan manusia. Sifat multidimensi kemiskinan inilah yang dicoba untuk ditangkap melalui berbagai macam konsep kemiskinan. Seperti dipahami tentang empat jenis kemiskinan yang dikemukakan di depan, maka dalam riset ini dirasa perlu merumuskan kemiskinan struktural dan kemiskinan natural. Walaupun kedua rumusan ini bukan hal yang baru melainkan maknanya tetap berada pada empat konsep kemiskinan tersebut. Pengertian kemiskinan struktural merujuk pada situasi dimana fenomena kemiskinan disebabkan oleh struktur yang diciptakan (didesain) hingga membelenggu masyarakat untuk maju secara keseluruhan. Adapun kemiskinan natural menggambarkan fenomena kemiskinan sebagai akibat dari miskinnya sumberdaya alam yang menghidupi masyarakat. Konsep tersebut membentuk suatu pemahaman tentang *image* realita kemiskinan dimana rumusan-rumusan kebijaksanaan dan langkah-langkah operasional didasari oleh *image* tersebut. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat apabila pembahasan tentang penanggulangan kemiskinan dimulai dengan mengkaji ulang pemahaman kemiskinan, dan menarik pelajaran dari upaya tersebut untuk tujuan penanggulangan kemiskinan secara utuh dan sistemik. Dengan perkataan lain, "penemuan" hakekat kemiskinan akan membantu dalam memberikan pencerahan dan pengayaan pandangan atau pemikiran, yang pada akhirnya relevan untuk menjadi masukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Misalnya, wujud kemiskinan di Surade berbeda dengan wujud kemiskinan di Pulau Buru. Namun jika diukur dengan nilai rupiah yang dihasilkan rumah tangga maka kedua komunitas tersebut tergolong miskin. Nilai penghasilan yang rendah membatasi mereka memiliki akses kepada standar kebutuhan dasar lain selain makanan, yakni kesehatan, pendidikan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan akses terhadap sarana dan prasarana pembangunan.

Kedua komunitas penduduk Surade dan Buru mengusahakan lahan sempit. Petani Surade mengusahakan atau memiliki lahan sempit karena pertumbuhan penduduk yang disertai komersialisasi lahan yang berlangsung cepat dan pola pewarisan lahan yang cenderung menciptakan fragmentasi pemilikan dalam skala usaha lebih kecil. Orang Bupolo mengusahakan lahan sempit bukan karena tidak punya tanah. Mereka memiliki tanah yang luas dengan sumberdaya alam yang kaya. Mereka tergolong miskin karena pola pertanian berpindah, subsisten, keterbatasan akses terhadap teknologi, terbatasnya jumlah tenaga kerja, pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dan komersialisasi usahatani yang masih lambat. Akhirnya, nilai rupiah yang mereka terima (pendapatan rumah tangga yang diukur dengan uang) masih rendah.

Mempelajari kemiskinan adalah mempelajari suatu permasalahan yang sebenarnya dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masalah nyata, hal ini sangat berbeda dengan pertanyaan disiplin yang umumnya bersifat abstrak. Apabila suatu pertanyaan disiplin ditunda pemecahannya, dampaknya tidak begitu berarti terhadap kehidupan individu yang memiliki masalah tersebut. Apabila permasalahan nyata seperti kelaparan tertunda pemecahannya, maka kematian akan mengancam individu yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan lebih dari sekedar bersifat bagaimana menghasilkan pengetahuan positif atau normatif, tetapi juga menggunakan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan resep (*prescription*) dan tindakan (*action*) untuk melaksanakannya. Mutu resep yang dihasilkan ditentukan oleh pengetahuan positif, normatif, dan pengetahuan interaktif dari keduanya, yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Adapun kualitas pelaksanaannya, selain ditentukan oleh mutu resep, adalah ditentukan juga oleh keahlian, keterampilan, ketekunan, ketabahan, keteguhan, dan sifat positif lainnya yang dimiliki oleh pelaksana dari resep tersebut.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan didasari atas persepsi tentang faktor-faktor penyebab dan dimensi kemiskinan itu sendiri. Jika penyebabnya ada didalam diri individu atau kelompok miskin, misalnya aspek budaya tidak mau bekerja keras, maka kebijakannya adalah memotivasi mereka bekerja keras agar dapat mandiri. Dalam hal ini pemerintah tidak mengintervensi pasar tetapi membiarkan sistem pasar bebas berlangsung apa adanya. Penduduk miskin itu sendirilah yang harus menyelesaikan sendiri masalah kemiskinannya. Memberikan bantuan material hanya mengakibatkan ketergantungan terus menerus sehingga tidak akan pernah mandiri. Kebijakan neo-liberalisme telah menganut paham ini. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa orang Bupolo tidak memiliki posisi tawar menawar (*bargaining position*) dalam pemasaran produksi mereka kepada pedagang Cina,

Arab dan Buton. Demikian halnya dengan petani Surade yang sepenuhnya tergantung dari harga yang ditentukan oleh tengkulak dan pedagang yang masuk ke desa. Artinya, penduduk miskin tidak mampu berhadapan dengan kekuatan pasar bebas, walaupun masih berada di tingkat lokal. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka penduduk miskin (demikian pula penduduk asli) akan menjadi penduduk miskin di daerahnya sendiri.

Image kemiskinan sebagai kemiskinan natural melandasi *judgement* bahwa kemiskinan itu sebagai sesuatu yang alami. Oleh karena itu adalah sudah bersifat alamiah apabila suatu daerah miskin sumber daya maka penduduknya juga miskin, atau seorang individu yang tidak mampu bekerja karena kondisi fisiknya tidak mengijinkan, maka individu tersebut miskin. Ini ibarat orang yang sudah dianggap sewajarnya tenggelam hanya karena perahunya pecah dan ia tidak dapat berenang. Pandangan simplistik ini lebih dominan dalam mendasari pola pembangunan selama ini seperti tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat, misalnya, untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka mencapai swasembada maka tingkatkanlah luas areal, intensitas tanam dan jaringan irigasi. Secara material hubungan antara luas areal, intensitas tanam dan irigasi dengan produksi padi adalah sangat jelas. Peningkatan unsur-unsur tersebut tidak otomatis akan meningkatkan produksi padi. Peningkatan produksi padi sangat tergantung pada keputusan apakah petani mau menanam padi dan memanfaatkan input tersebut.

Produksi padi memang meningkat melalui penggunaan benih unggul dan pupuk kimiawi. Namun dalam jangka panjang, pengabaian terhadap kerarifan lokal berakibat buruk pada kelestarian lingkungan alam padi sawah dan genetiknya. Penduduk desa di Surade Jawa Barat menyatakan bahwa benih-benih lokal yang memiliki ketahanan terhadap hama penyakit telah lama lenyap digantikan oleh benih unggul. Petani menjadi tergantung kepada pembelian benih unggul setiap musimnya. Di samping itu penggunaan pupuk kimiawi tidak hanya meningkatkan biaya produksi yang cenderung naik tetapi juga mengakibatkan struktur tanah yang makin keras, kelelahan tanah (*soil depletion*) dan efek sampingnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Pada akhirnya, peningkatan produksi tanpa adanya jaminan harga yang wajar selalu merugikan usahatani petani.

Orang Bupolo di pedalaman pulau Buru merupakan masyarakat peladang, berpindah, terisolir dan sepenuhnya tergantung dari alam. Alam merupakan laboratorium kehidupan mereka di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dari pola ladang yang ditanduskan (*long fallow cultivation*), tampak bahwa mereka memiliki kearifan dalam mengelola sumber daya alam sebagai sumber makanan bagi kehidupan keluarga.

Pola makan orang Bupolo menggambarkan bahwa mereka relatif tidak kekurangan bahan makanan. Bahkan jenis makanan yang dikonsumsi mengandung karbohidrat yang tinggi (sagu), protein (daging buruan dan ikan) serta vitamin (sayuran). Jika ukuran kemiskinan dipakai berdasarkan kemampuan memenuhi konsumsi makanan keluarga, maka orang Bupolo bukanlah orang miskin dalam kategori BPS. Itu berarti bahwa konsep kemiskinan masih belum terlambat untuk ditinjau kembali. Khususnya dikemukakan di sini bahwa kemiskinan penduduk di Pulau Buru seolah-olah merasa terisolir sendiri karena mekanisme, sistem, dan kebijakan pemerintah regional dan nasional yang pada gilirannya membuat mereka terbelenggu dalam keterisolasiannya. Kenyataan di lapangan membuktikan baik penduduk *autokton* maupun *alokton* adalah masyarakat yang tidak terisolir, karena mereka selalu berhubungan dengan orang luar karena perdagangan. Misalnya secara rutin mereka bisa berkomunikasi dengan pedagang antar pulau dan para pendatang lainnya yang secara bebas datang menggunakan transportasi laut. Harus dipahami bahwa karakteristik inilah yang dimiliki oleh orang pulau di manapun bahkan orang pulau adalah orang yang selalu ramah dan gembira dengan hadirnya para pendatang dalam arti bahwa mereka akan bersuka ria jika ada kapal besar, sedang, kecil yang membuang sauhnya di pesisir pantai mereka. Dengan spontan semua masyarakat pulau akan keluar rumah untuk menyambutnya. Namun hal penting yang perlu diperhatikan dalam interaksi tersebut adalah sejauhmana masyarakat asli memperoleh manfaat sosial, budaya dan terlebih ekonomi. Hal ini memerlukan sudut pandang sendiri. Kebutuhan masyarakat Bupolo didasarkan akan nilai kepercayaan (*trust*) dan kejujuran barangkali jauh lebih penting daripada nilai uang hasil perdagangan dengan orang Buton, keturunan Arab dan Cina. Sebaliknya, nilai uang barangkali menjadi faktor yang memotivasi pedagang untuk berinteraksi dengan masyarakat Bupolo. Terlepas dari penilaian subyektif tentang nilai ekonomi, keadilan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan memang menjadi konsep yang penting dipertimbangkan dalam pembangunan manusia.

Penduduk miskin tidak mampu bersaing dengan pedagang maka kebijakan neo-liberalisme itu tidak tepat diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan memberikan bantuan material dan uang sudah biasa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini telah lama dianut oleh paham konservatisme. Alasannya karena penduduk miskin sama sekali tidak berdaya menghadapi kekuatan pasar bebas. Pemerintah perlu memberikan bantuan agar mereka mampu bertahan, tetapi tidak melakukan intervensi terhadap sistem dan struktur pasar bebas di dalam negeri.

Memang benar, pola bantuan yang diterapkan pemerintah selama ini melalui badan pemerintah tidak hanya menciptakan ketergantungan penerima bantuan kepada pemerintah tetapi juga menciptakan peluang korupsi dan biaya transaksi lainnya. Bantuan kredit

usaha tani meluap ditengah jalan dan sangat rendah tingkat pengembaliannya, bantuan peralatan dan material (traktor, perahu, dan ternak) banyak yang tidak berkelanjutan dan bantuan uang dan beras murah banyak yang bias. Pola bantuan tersebut belum berhasil memberdayakan petani (mandiri), sebaliknya justru telah menciptakan persepsi petani bahwa pembangunan identik dengan pemberian bantuan. Jadi, baik kebijakan neo-liberalis maupun konservatif belum berhasil mengentaskan penduduk miskin. Salah satu pandangan yang mencari jalan tengah di antara keduanya adalah kebijakan demokrasi sosial. Penduduk miskin memang tidak mampu menghadapi pasar bebas karena mereka tidak memiliki daya tawar menawar. Oleh karena itu mereka perlu mendapat bantuan dan subsidi pemerintah. Dalam waktu yang sama, pemerintah tidak cukup hanya memberdayakan penduduk miskin melalui bantuan, tetapi juga turut aktif mengontrol dan mengintervensi pasar bebas dalam batas tertentu. Pemberdayaan dalam arti utuh memerlukan sentuhan sistematika dan menyeluruh, tidak hanya memberi bantuan material tetapi juga pengetahuan dan ketrampilan. Tidak hanya memperbaiki teknologi produksi, tetapi juga memperbaiki pengolahan dan mutu produk hingga melindungi pasarnya. Tidak masuk akal jika hanya membantu penduduk miskin menghasilkan produksi lalu membiarkan mereka sendiri mencari pasarnya di dalam dan di luar negeri. Pada tahap awal pemerintah perlu berperan dalam mendampingi hingga mampu berdiri sendiri. Kebijakan demokrasi sosial ini tampaknya lebih tepat diterapkan di Indonesia, termasuk di Surade dan Buru, tetapi memerlukan komitmen pemerintah, pelaku pembangunan dan pelaku perdagangan di daerah yang memihak pada pemberdayaan penduduk miskin. Jika tidak ada intervensi pasar guna melindungi penduduk miskin, maka para kapitalis akan tetap "menelan" mereka yang miskin tanpa pernah keluar dari lingkaran kemiskinannya. Upah rendah akan tetap berlaku dan pengangguran tak pernah terselesaikan. Akibatnya, kesenjangan antara kaya dan miskin makin besar dan hal ini merupakan benih konflik laten (*latent conflict*) yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang nyata (*manifest conflict*).

4. Kesimpulan

Kemiskinan memiliki banyak sisi (*multifacet*). Oleh karena itu penting melihatnya dari beragam sudut pandang (*multilenses*). Kemiskinan penting didefinisikan menurut beragam konsep yang ditemukan dalam penelitian terdahulu, studi literatur maupun konsep yang didefinisikan oleh kelompok penduduk miskin itu sendiri. Dalam riset ini yang dikembangkan adalah konsep kemiskinan subjektif. Diharapkan adanya sinergi definisi dari penduduk miskin dan kelompok luar (pemerintah, lembaga riset, dan swasta/bisnis) akan melahirkan definisi yang lebih spesifik untuk masyarakat tertentu di lokasi tertentu, sekaligus holistik, sistemik dan dinamis. Misalnya, indikator kemiskinan di Surade, Jawa Barat meliputi kekurangan pangan, kondisi rumah yang sangat sederhana, membeli pakaian

setahun sekali, tidak memiliki tanah, tidak memiliki akses ke pendidikan dan kesehatan. Di kalangan masyarakat di Pulau Buru, indikator kemiskinan meliputi pola lahan berpindah yang masih subsisten, keterbatasan akses terhadap permodalan dan perbaikan teknologi pertanian dan isolasi dalam arti mahal biaya transportasi (waktu dan tenaga). Kedua komunitas mengandalkan tenaga kerja sendiri dan keluarga, produksi terbatas di lahan terbatas serta lemah dalam tawar-menawar dengan pedagang. Akibatnya mereka juga sama-sama berpenghasilan rendah sehingga tidak memiliki akses kepada pendidikan dan kesehatan. Sekali definisi dibuat maka diperlukan komitmen dan upaya berkelanjutan untuk melakukannya, sebab kemiskinan hanya dapat diatasi dengan belajar dari tindakan nyata (*learning by doing*) bukan sekedar mengumpulkan datanya dan membicarakannya (*learning by talking*).

Ucapan Terima Kasih

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Selo Soemardjan Research Center FISIP-UI yang mendanai penelitian ini dan sekaligus telah menganugerahkan Selo Soemardjan Award 2005. Tulisan ini juga untuk mengenang pengabdian Alm. Prof. Selo Soemardjan dalam merintis perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada kolega Dr. Ir. Wardis Girsang, M.Si. yang telah berkontribusi memberikan data di Surade, Jawa Barat dan berpartisipasi dalam diskusi ilmiah kemiskinan.

Daftar Acuan

Alcock, P. (1997). *Understanding poverty*. London: Macmillan Press.

Biro Pusat Statistik. (2006). Berita resmi statistik. tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2006. No.47/IX 1 September 2006. Diunduh 18 Oktober 2008 dari <http://www.bps.co.id>.

Biro Pusat Statistik. (2007). Berita resmi statistik. tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007. No.38/07/Th.X 2 Juli 2007. Diunduh 29 Oktober 2008 dari <http://www.bps.co.id>.

Carney. (1998). *Sustainable livelihood strategies*. London: International Institute for Environment and Development.

Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. UK: Longman-Harlow.

Clayton, B. D., David, D., & Olivier, D. (2000). *Rural planning in the developing world with a special focus on natural resources: Lessons learned and potential*

contributions to sustainable livelihoods. London: International Institute for Environment and Development, and Department for International Development.

Girsang, W. (2005). *Participatory learning in extension for Fasciolosis Control Strategies in Indonesia*. Disertasi Doktor, School of Natural and Rural Systems Management, University of Queensland, Brisbane, Australia.

Harris-White, B. (2005). Destitution and poverty of its politics-with special reference to South Asia. *World Development* 33:881-891.

Pattinama, M. J. (2005). *Les Geba Bupolo et leur milieu, Population de l'île de Buru, Moluques, Indonésie*. Liwit lalen hafak lalen snafat lalin butemen (*Vannerie virile, sarong féminin et émulsion qui flue*). Disertasi Doktor, Ecole doctorale du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.

Pattiselano, A. E. (2000). *Analisis sikap dan perilaku terhadap sasi pada masyarakat Pulau Saparua Kabupaten Maluku Tengah*. Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Sayogyo (1978). Lapisan masyarakat yang paling lemah di pedesaan Jawa. *Prisma No.3, LP3ES*,3-14.

Soerjani, M. (2005). Krisis kearifan kita. *Kompas, Kamis 20 Oktober 2005*.

Suhardianto, H. (1999). Jawa Barat: Desa Adat. Dalam Mubyarto (Editor), *Pemberdayaan ekonomi rakyat. Laporan kaji tindak program IDT*, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.

Suhardono, Copeman, D. B. & Roberts, J. A. (1996). *Biological control of Fasciola gigantica with Echinostoma revolutum*. Draft of a paper being prepare for publication from AS1/9123.

Tjondronegoro, S. M. P., Soejono, I. & Hardjono, J. (1996). Indonemiskinesia. Dalam M.G. Quilibria (Editor), *Rural poverty in developing Asia. Part 2: Indonesia, Republic of Korea, Philippines and Thailand*. Manila: Published by Asian Development Bank.

van Oostenbrugge, J. A. E, van Densen, W. L. T. & Machiels, M. A. M. (2004). How the uncertain outcomes associated with aquatic and land resource use affect livelihood strategies in coastal communities in the Central Moluccas, Indonesia. *Agricultural Systems* 82:57-91.